

Evaluasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate

Nadya Safira Marsaoli

Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia

Surel: 18512174@students.uii.ac.id

ABSTRAK: Ternate merupakan kota kepulauan yang perkembangan aktivitas kota dan masyarakat berlangsung di pesisir pantai. Pembangunan Kota Ternate diupayakan untuk meningkatkan serta mengembangkan Kota Ternate di dalam Suatu Sistem wilayah kepulauan dengan melalui peningkatan dan penyediaan infrastruktur yang dapat memberi sebuah ciri khas sebagai kota pantai. Salah satunya yaitu permukiman penduduk yang berada di wilayah kelurahan makassar timur terdiri dari permukiman yang berada di darat dan permukiman yang terletak di atas laut. Keberadaan permukiman di atas laut yang tidak ditanjung dengan prasarana yang mendukung dan memadai justru dapat menimbulkan pencemaran. Tidak tersedianya fasilitas yang memadai, memberikan pengaruh yang buruk terhadap perilaku masyarakat yang lebih cenderung membuang sampah rumah tangga dan kegiatan usaha langsung ke laut, sehingga membuat lingkungan pesisir dengan peruntukan tempat tinggal menjadi kotor, kumuh, dan tidak sehat. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana karakteristik prasarana di kelurahan Makassar Timur, serta faktor yang mempengaruhi menurunnya kualitas lingkungan di kelurahan Makassar Timur. Mengikuti standar yang sesuai dengan Pengaturan Pemerintah Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kelurahan Makassar Timur masih kurang sesuai. Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil analisis yaitu dibutuhkan penyediaan prasarana yang merata, serta pemanfaatan ruang pesisir.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Kawasan Pesisir

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Wilayah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu karunia dari Tuhan yang Maha Esa, Dimana Bangsa Indonesia memiliki letak serta kedudukan yang strategis sebagai sebuah negara kepulauan.

“Indonesia memiliki wilayah pesisir yang merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya disebut sebagai UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Ruang lingkup wilayah pesisir memperoleh pengaturan secara tegas.”

Wilayah pesisir ini memiliki sumberdaya dan lingkungan yang dapat dimanfaatkan keanekaragamannya untuk masa yang akan datang bila pengelolaannya dilakukan secara baik dan bijaksana. Selain itu, Wilayah pesisir juga berfungsi sebagai system penyangga kehidupan, jadi perlindungan pantai sangat penting bagi kelanjutan eksistensi manusia. Dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa wilayah pesisir dan lautan Indonesia mengandung begitu banyak sumber daya alam yang berlimpah.

Selain itu, Ekosistem yang berada di pesisir juga memiliki potensi untuk dikembangkan seperti pelabuhan, pariwisata, dll. Melihat potensi-potensi tersebut maka sangat diharapkan untuk pemanfaatan serta pengembangan ruang dipesisir yang memiliki keanekaragamannya harus tetap mempertimbangkan tataan lingkungan dan kelestarian fungsi dari wilayah pesisir tersebut. "Pengelolaan diwilayah pesisir secara terpadu dapat dikatakan merupakan suatu pendekatan terhadap pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya dan kegiatan pemanfaatan untuk pembangunan secara terpadu (integrated) untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan (Meta, 1975 dalam Rokhim, 1996)"

Seiring berjalannya waktu dinamika perkembangan kota maka kebutuhan akan ruang permukiman semakin meningkat. Kota Ternate memiliki kondisi topografi yang tidak rata, sehingga banyak yang menjadikan wilayah pesisir sebagai pilihan utama dalam pemanfaatan ruang. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tidak sebanding dengan penyiapan prasarana dalam pendukung permukiman, sehingga turunnya nilai lingkungan pesisir karena pencemaran.

Permukiman penduduk yang berada di wilayah kelurahan Makassar Timur terdiri dari permukiman yang berada di darat dan permukiman yang terletak di atas laut. Keberadaan permukiman di atas laut yang tidak ditanjung dengan prasarana yang mendukung dan memadai justru dapat menimbulkan pencemaran. Tidak adanya fasilitas yang memadai akan memberikan pengaruh yang buruk pada perilaku masyarakat yang lebih cenderung membuang sampah rumah tangga dan kegiatan usaha langsung ke laut, sehingga membuat lingkungan dipesisir dengan peruntukan tempat tinggal menjadi kumuh, kotor, dan tidak sehat.

Rumusan Masalah

Keberadaan permukiman masyarakat yang berada di atas laut, ternyata menimbulkan dampak negative di lingkungan pesisir dikarenakan penduduk yang menjadikan laut sebagai tempat untuk membuang sampah rumah tangga, serta pembangunan permukiman yang tidak teratur dan pola hidup masyarakat yang tidak sehat, menjadi penyebab dari timbulnya masalah kumuh pada permukiman. Hal ini di karenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebersihan pada tempat tinggal.

Bedasarkan latar belakang, maka kondisi yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik prasarana permukiman kelurahan Makassar Timur Kota Ternate?
2. Apa solusi yang harus dilakukan untuk agar kawasan ini memenuhi standar kawasan permukiman pesisir?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kualitas lingkungan permukiman dikelurahan Makassar Timur?

Tujuan

1. Untuk mengetahui karakteristik prasarana permukiman dikelurahan Makassar Timur.
2. Untuk mengetahui solusi apa yang harus dilakukan agar kawasan tersebut memenuhi stadar kualitas permukiman pesisir.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kawasan tersebut menurun kualitas lingkungan permukiman dikelurahan Makassar Timur.

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Kawasan

Kelurahan Makassar Timur merupakan salah satu kelurahan yang berada di kawasan pesisir. Wilayah Kelurahan Makassar Timur ini merupakan Bagian Wilayah Kota I (BWK I) yang diperuntukan sebagai kawasan dengan intensitas tinggi, seperti perdagangan, perkantoran, pusat kota, permukiman, dan pelabuhan. Permukiman merupakan salah satu pemanfaatan ruang pesisir yang berkembang di kawasan tersebut. Akan tetapi penggunaan ruang pesisir tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota).

Permukiman di kawasan ini terdiri dari permukiman yang berada di darat dan permukiman yang terletak di atas laut. Keberadaan permukiman yang terletak di atas laut ini menimbulkan pencemaran dikarenakan masyarakat yang masih sering membuang sampah sembarangan.

Selain itu juga permukiman penduduk di permukiman atas laut mencapai 534 jiwa. yang terdiri dari penduduk asli Ternate dan juga para pendatang dari pulau Sulawesi maupun Halmahera yang sudah menetap sangat lama disana. "Menurut Sujarto (dalam Erick Sulestianson, 2014) meningkatnya pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dan migrasi ke perkotaan, menjadi alasan terjadinya peningkatan perkembangan aktivitas suatu kota. Perkembangan tersebut yang menyebabkan terjadinya perubahan pada struktur kota. Perubahan yang terjadi akan menuju pada kemerosotan di suatu lingkungan permukiman, penggunaan lahan yang kurang efisien di pusat kota, dan menunjukkan bahwa menurunnya kualitas tersebut bisa terjadi di setiap bagian kota."

Dikarenakan tidak adanya fasilitas permukiman yang tidak memadai, memberikan dampak yang buruk pada perilaku dari masyarakat sekitar yang cenderung membuang sampah rumah tangga ataupun kegiatan usaha secara langsung ke laut, sehingga membuat pencemaran terjadi dan tempat tinggal terlihat menjadi kotor, kumuh dan tidak sehat.



(sumber:<https://poskomalut.com/2020/01/14/200-unit-rumah-di-kampung-makassar-timur-kota-ternate-akan-dieksekusi/>)

Komponen Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) menurut Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Perencanaan Wilayah Pesisir

Variabel	Kawasan Skala Besar
Sarana	
Taman Kanak – Kanak	1 Unit
Peribadatan	1 Unit
Balai RW	1 Unit
Puang Terbuka Hijau	30 % dari Luas Perumahan
Prasarana	
Jaringan Jalan	Paving
Jaringan Listrik	Terdistribusi Seluruh Perumahan
Drainase	Ada dan Berfungsi dengan Baik, Tidak Terjadi Genangan Banjir
Jaringan Air Bersih (PDAM)	Tiap Rumah Sudah Tersedia Air Bersih PDAM
Sanitasi	Tiap Rumah Sudah Memiliki Sanitasi
Jaringan Telepon	Terdapat Jaringan Telepon di Perumahan
Jaringan Persampahan	Tersedianya Pengelolaan Persampahan Perumahan

Sumber: PP No 14 Tahun 2016

Perencanaan merupakan bagian dari pengelolaan (Rutveid, 1980) mengemukakan bahwa Perencanaan adalah proses penyampaian sekumpulan keputusan untuk melakukan tindakan pada masa depan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan cara-cara yang disukai. Selanjutnya dikatakan pengelolaan secara singkat merupakan usaha manusia untuk menata suatu system tertentu.

Kawasan yang berada di pesisir mempunyai potensi serta kendala tersendiri dalam pemanfaatan oleh masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Terdapat berbagai macam permasalahan untuk menyamai komponen yang berupa sumber daya alam, lahan, dll. "Pengelolaan dikawasan pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang mencakup dua atau lebih ekosistem, sumber daya dan kegiatan pemanfaatan yang digunakan untuk pembangunan secara terpadu (integrated) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan (Meta, 1975 dalam Rokhim, 1996)".

Menurut Dauhari (1996), pada dasarnya terdapat tiga langkah utama dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, dimana ketiga langkah utama ini merupakan keterkaitan perencanaan pengelolaan yang tidak dapat dibuat secara terpisah yang akan berakibat pada tidak sejalanannya pola pemikiran yang telah digariskan. Ketiga langka tersebut yaitu : (1) Perencanaan, (2) Implementasi, (3) Pemantauan. Kegiatan serta waktu dan biaya di perlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta cara pelaksanaan kegiatan.

Kebutuhan data dan Informasi

Kebutuhan data dan Informasi bagi perencanaan pengelolaan wilayah pesisir menurut Rais (1996), hendaknya di sesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya (*user's need*), yaitu:

- 1) Dari segi ekologis, terdapat tiga syarat utaman yang harus dipenuhi untuk pembangunan pesisir pantai yang berkelanjutan. Pertama, semua aktivitas pembangunan hendaknya ditempatkan di lokasi yang secara ekologis sama dengan persyaratan dari kegiatan pembangunan. Kedua, laju pembangunan limbah ke dalam

kawasan pesisir hendaknya tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi wilayah tersebut dan ketiga, bahwa laju pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir, khususnya yang dapat pulih, hendaknya tidak melebihi atau melampaui kemampuan pulih dalam kurun waktu tertentu atau pemanfaatan sumberdaya secara optimal.

- 2) Dari segi social-ekonomi-budaya, laju dari pembangunan harus dirancang sedemikian rupa, sehingga permintaan total kebutuhan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir tidak melebihi atau melampaui kapasitas ekosistem pesisir untuk menyediakan.
- 3) Dari segi social-politik, mensyaratkan bahwa perlu adanya suasana yang kondusif bagi segenap lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam pembangunan sumber daya wilayah pesisir.
- 4) Dimensi hukum dan kelembagaan, diperlukan system serta kinerja dari kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan.

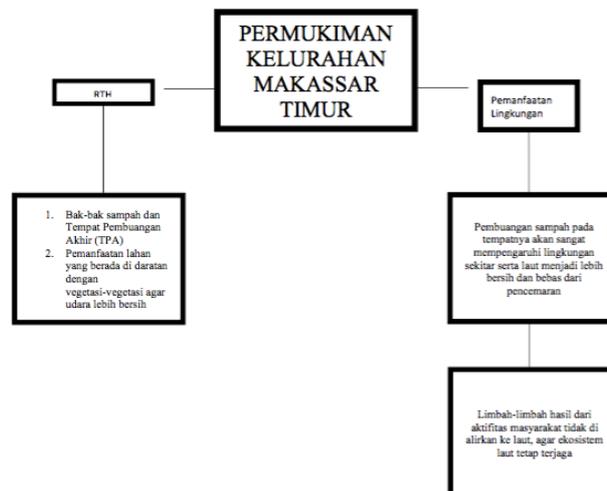
Dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dibutuhkan kebutuhan data serta informasi yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan agar pemanfaatan sumber daya ruang pesisir memenuhi tujuan, seperti pariwisata, pelabuhan, tambak, dll.

Pemilihan Daerah Permukiman

Menurut Umar Fachmi Achmadi rumah sehat harus mempunyai indikator :

- Perilaku hidup sehat dari penduduknya. Seperti membuang sampah pada tempatnya.
- Berkenan dengan kondisi fisik rumah yaitu ukuran rumah dan dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan fisik permukiman, kualitas udara permukiman serta sarana kesehatan dilingkungan permukiman.

PETA KONSEP



METODE ANALISIS

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik prasarana di kelurahan Makassar Timur, serta faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kualitas lingkungan kelurahan Makassar Timur. Menggunakan deskriptif kualitatif sebagai metode penelitian

diharapkan dapat mengetahui solusi apa yang harus dilakukan agar kawasan tersebut memenuhi standar kualitas permukiman pesisir.

Pengumpulan informasi dilakukan dengan cara survey dan dokumentasi. Variable yang di gunakan dalam penelitian yaitu sarana (taman kanak-kanak, balai RW, sarana peribadatan dan RTH) dan prasaena (jaringan listrik, drainase, jaringan jalan, jaringan air bersih, sanitasi, jaringan telepon, dan jaringan persampahan).

PEMBAHASAN

Permukiman kelurahan Makassar Timur terdiri atas wilayah permukiman di daratan dan permukiman di atas laut. Permukiman ini terdiri dari 3 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah permukiman ini sekitar 4,5 Ha dengan jumlah penduduk kisaran 2401 jiwa. Wilayah Makassar Timur ini berdekatan dengan pusat kota serta fasilitas perkotaan seperti terminal, pertokoan, perkantoran dan pasar.



(sumber: google earth)

Dengan kondisi tersebut secara tidak langsung menjadi alasan bagi para penduduk memilih untuk bertempat tinggal karena memiliki tempat yang cukup strategis bagi mereka dalam mencari mata pencaharian. Pengumpulan data hasil dari wawancara penduduk sekitar, terdapat beberapa faktor yaitu ketersediaan lahan, prasarana yang kurang memadai, dan kondisi lingkungan.

1. Ketersediaan Lahan

Permukiman yang tumbuh di sepanjang Jl. Yasin Gamsungi yang berada di tepi laut, pada mulanya rumah-rumah berorientasi pada jalan tersebut dan membelakangi laut. Namun seiring berjalannya waktu perkembangan kota dan aktifitas perdagangan yang sebagian besar merupakan warga pendatang ini mulai menggunakan lahan atas laut ini sebagai tempat tinggal mereka karena letaknya yang berdekatan dengan aktifitas perdagangan. Hal ini membuat lahan di atas laut semakin banyak dan terus meningkat

2. Prasarana

- Pelayanan Sarana Sampah

Penduduk permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur beraktivitas dan membuang sampah rumah tangga dan sampah industry secara langsung ke laut. Data dari hasil wawancara di ketahui sekitar 75% masyarakat masih membuang sampah rumah tangga langsung ke laut dan 25% lainnya yang tinggal dekat darat membuang sampah ke bak-bak sampah yang sudah tersedia di pinggiran jalan.

- Air Bersih
Pelayanan air bersih dari PDAM dan sumur bor untuk kebutuhan penduduk dirasa cukup bagi masyarakat.
 - Akses jalan
Akses menuju permukiman atas laut ini hanya terbuat dari papan dengan tiang-tiang penopang dari kayu, hanya sebagian kecil saja jalan yang dibuat dari beton. Lebar jalan yang menghubungkan rumah-rumah tersebut hanya sekitar 1-1,5 meter.
3. Kondisi Lingkungan Permukiman
- Sampah di Lingkungan Permukiman
Sumber sampah yang berada di lingkungan permukiman atas laut sebagian besar berasal dari buangan penduduk setempat yang cenderung menjadikan laut sebagai tempat pembuangan.
 - Tingkat Kenyamanan dan Penyebab Ketidaknyamanan di Lingkungan Permukiman
Beberapa penduduk yang di wawancara mengatakan bahwa mereka kurang nyaman dengan kondisi lingkungan sekitar mereka yang kotor serta bau yang tidak sedap yang dihasilkan dari sampah yang dibuang ke laut.
 - Tempat Pembuangan Akhir Masyarakat Setempat
Dikarenakan tidak adanya sarana persampahan, masyarakat memilih laut sebagai tempat mereka membuang sampah karena mudah di jangkau oleh mereka.

Hasil analisis dari sarana dan prasarana Permukiman di kelurahan Makassar Timur dengan Pengaturan Pemerintah Tahun 2016.

Variabel	Eksisting	Pengaturan Pemerintah	Analisis
Sarana			
TK	1 unit	1 unit	Sesuai
Peribadatan	2 unit (Masjid An-Nur dan Masjid Ar-Rahman)	1 unit	sesuai
Balai RW	Tidak Ada	1 unit	Tidak Sesuai
RTH	1 unit ruang terbuka	30% dari Luas Perumahan	Tidak Sesuai
Prasarana			
Jaringan Jalan	papan dengan tiang-tiang penopang dari kayu, hanya sebagian kecil saja jalan yang dibuat dari beton. Lebar jalan yang menghubungkan rumah-rumah tersebut hanya sekitar 1-1,5 meter.	Paving	Tidak Sesuai
Jaringan Listrik	Sudah terdistribusi semua	Sudah terdistribusi semua	Sesuai
Drainase	Terdapat di beberapa tempat	Ada dan Berfungsi dengan baik, tidak terjadi genangan air	Tidak Sesuai
Jaringan Air Bersih (PDAM)	PDAM	Tiap rumah sudah tersedia air bersih	Sesuai
Sanitasi	Beberapa rumah memiliki saptitank	Tiap rumah memiliki Sanitasi	Tidak Sesuai
Jaringan Telepon	Sudah tersedia jaringan telepon	Terdapat Jaringan Telepon di setiap perumahan	Sesuai
Jaringan Persampahan	Sistem pengelolaan sampah yang masih kurang memadai	Tersedianya Pengelolaan Persampahan Perumahan	Tidak Sesuai

(sumber: Analisis Penulis)

Analisis Kondisi Ekosistem Laut

Kondisi laut serta ekosistem laut yang berada di wilayah kelurahan Makassar Timur menjadi perhatian utama, dikarenakan merusak ekosistem laut serta menurunkan nilai lingkungan karena pencemaran. Permukiman atas laut ini terus bertambah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut membuat para penduduk untuk membuang sampah rumah tangga langsung ke laut, kebiasaan itu sudah merupakan hal yang lazim. Sampah-sampah yang dibuang ke laut dapat mempengaruhi biota laut karena pencemaran. Oleh karena itu, kebutuhan prasarana persampahan di lingkup RT di perlukan penyediaan tong sampah di setiap unit-unit rumah.

KESIMPULAN

Pemanfaatan terhadap ruang pesisir yang berada di wilayah kelurahan Makassar Timur kota Ternate merupakan pemanfaatan ruang sebagai permukiman. Akibat yang di hasilkan dari keberadaan permukiman ini yaitu menurunnya kualitas lingkungan sekitar pesisir, dikarenakan perilaku masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga maupun sampah dari aktifitas lainnya langsung ke laut. Mengakibatkan lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, sehingga memberi kesan kumuh dan memperburuk nilai estetika lingkungan pesisir.

Permukiman di kelurahan Kampung Makassar kurang sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Karena tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung khususnya prasarana sampah memberi pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku masyarakat sekitar dalam membuang sampah. Partisipasi masyarakat yang kurang dalam membersihkan lingkungan sekitar juga merupakan alasan menurunnya kualitas lingkungan pesisir. Sehingga perlu adanya pengawasan dari pemerintah dalam perijinan pengadaan perumahan skala besar dalam hal penyesiaan sarana dan prasarana umum.

SOLUSI

- Penyediaan prasarana infrastruktur
- Membangun partisipasi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan lingkungan pesisir juga merupakan hal yang penting
- Pengaturan pemanfaatan ruang pesisir dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (1996). Pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan secara terpadu. *PT. Pramadya Paramita, Jakarta.*
- DESI, M. S. (2017). *ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN PURUS KECAMATAN PADANG BARAT KOTA PADANG* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ANDALAS).
- Hariyanto, A. (2010). Strategi penanganan kawasan kumuh sebagai upaya menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat (contoh kasus: kota Pangkalpinang). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota UNISBA*, 7(2), pp-11.
- Kristiyanti, M. (2016, August). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Melalui Pendekatan ICZM (Integrated Coastal Zone Management). In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2016*. Stikubank University.

- Lestari, S. (2010). *Implementasi Program Penataan Kawasan Kumuh Pesisir Perkotaan (Studi di Kelurahan Kroman dan Lumpur Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- MAHNUNAH, N. M., & SUNARTI, S. (2011). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PERBAIKAN PRASARANA PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PESISIR KELURAHAN TANJUNG EMAS, KOTA SEMARANG* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS DIPONEGORO).
- Pemukiman, M. (2003). Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir. Seminar Umum Dies Natalis ITS ke-34. Surabaya.
- Rohmadiani, L. D., & Aini, R. N. (2020). Tingkat Kesesuaian Sarana dan Prasarana Perumahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah. *Jurnal Plano Buana*, 1(1), 46-54.
- Yonaldi, S. (2017). Permukiman Kumuh dan Upaya Penanganannya. *Artikel. Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diakses, 18.*
<https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/11/UU-32-Tahun-2014.pdf>